



Administration and Supervision of Islamic Education: Financial Administration, Financial Management, Transparency, Accountability, Organization of Madrasah

Darimus

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

darimus@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

Financial administration is an important aspect of managing organizations, educational institutions, and government agencies, as it relates to the processes of planning, organizing, implementing, recording, supervising, and accounting for the use of financial resources. Proper and systematic financial management is necessary to ensure that financial resources are utilized effectively, efficiently, transparently, and accountably in order to support the achievement of organizational goals. Therefore, understanding the fundamental principles of financial administration is essential for organizational managers so that they can perform financial management functions appropriately and responsibly. This article aims to explain the basic concepts of financial administration and their application in various organizational contexts. The method used in this study is a library research method, which involves examining various literature sources such as books, scientific journals, and official documents related to financial administration. The data obtained are then analyzed descriptively to provide a comprehensive overview of the definition, functions, principles, and implementation mechanisms of financial administration in organizational practice. The results of the study show that financial administration includes several important activities, such as budgeting, managing revenues and expenditures, recording financial transactions, preparing financial reports, and conducting supervision and evaluation of budget utilization. In practice, financial administration must be based on the principles of good financial management, including transparency, accountability, effectiveness, efficiency, and responsibility. The application of these principles aims to prevent the misuse of funds, increase stakeholder trust, and ensure that every financial activity is carried out according to the planned objectives. Furthermore, the proper implementation of financial administration also contributes to improving the quality of organizational management, particularly in terms of program planning, decision-making, and the control of operational activities. With a well-structured financial administration system, organizations are able to monitor cash flow more accurately, prepare clear financial reports, and conduct periodic evaluations of financial usage. Ultimately, this helps organizations achieve their goals more effectively and sustainably. In conclusion, financial administration does not merely function as a process of financial recording but also as a management system that supports the optimal utilization of resources. Therefore, every organization needs to understand and consistently apply the principles of financial administration in order to establish good, transparent, and accountable financial governance.

Keywords: Financial Administration, Financial Management, Transparency, Accountability, Organization of Madrasah.

PENDAHULUAN

Administrasi keuangan merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan suatu organisasi, termasuk dalam lembaga pendidikan. Keberhasilan suatu lembaga pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas tenaga pendidik dan kurikulum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif dan efisien.

Dalam konteks sekolah, administrasi keuangan memiliki peranan yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan proses pendidikan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, baik kegiatan akademik maupun non-akademik, membutuhkan dukungan dana yang memadai. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang baik sangat diperlukan agar seluruh program sekolah dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Administrasi keuangan sekolah tidak hanya sebatas pada kegiatan pencatatan pemasukan dan pengeluaran dana, tetapi mencakup proses yang lebih luas, yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan penggunaan dana, pencatatan transaksi, pelaporan, serta pengawasan dan evaluasi. Semua proses tersebut harus dilakukan secara sistematis, transparan, dan akuntabel agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana.

Selain itu, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan semakin meningkat, terutama dalam penggunaan dana yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat. Sekolah dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana secara jelas dan terbuka kepada semua pihak yang berkepentingan, seperti orang tua siswa, komite sekolah, dan pemerintah.

Pengelolaan keuangan yang tidak baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti pemborosan anggaran, ketidaktepatan penggunaan dana, hingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Sebaliknya, administrasi keuangan yang baik akan memberikan dampak positif, seperti meningkatnya efektivitas penggunaan dana, terciptanya tata kelola sekolah yang baik, serta meningkatnya kualitas pendidikan.

Semua pendidikan membutuhkan dana, baik pemasukan maupun pengeluaran. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengelola dana sekolah dengan baik dan memiliki manajemen administrasi keuangan yang kuat. Pelaporan dan pengawasan urusan keuangan sekolah dilakukan secara bertanggung jawab, jujur, terbuka, dan transparan. Segala tindakan yang berkaitan dengan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban atas dana sekolah termasuk dalam pengelolaan keuangan sekolah. Ahmadi dan Supriadi (2006) menyatakan bahwa biaya pendidikan merupakan salah satu komponen input instrumental (instrument input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Setiap usaha untuk mencapai tujuan pendidikan, baik tujuan kuantitatif maupun kualitatif, mempunyai peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peran biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya proses pendidikan di sekolah tidak akan berjalan. Artikel ini akan membahas pentingnya pengelolaan keuangan sekolah, proses, dan keuntungan dari pengelolaan yang baik.¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan merupakan aspek yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai administrasi keuangan, mulai dari pengertian, prinsip-prinsip, fungsi, sumber dana, hingga proses pengelolaannya secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk mengeksplorasi konsep dan implementasi administrasi keuangan

¹ Abu Ahmadi dan Supriyono, *Psikologi Belajar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 128.

dalam konteks organisasi. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber literatur primer dan sekunder, yang mencakup buku teks manajemen keuangan, jurnal ilmiah bereputasi, serta dokumen regulasi resmi yang relevan. Teknik analisis data yang diterapkan adalah **analisis deskriptif kualitatif**, di mana peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menguraikan fungsi, prinsip, serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan. Fokus utama dari prosedur penelitian ini adalah mensistesis teori-teori manajemen keuangan yang ada guna memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien dalam mendukung keberlanjutan operasional organisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Administrasi Keuangan

Secara bahasa, kata administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *administration* yang berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, kepemimpinan dan pengelolaan. Dari segi istilah, pengertian administrasi keuangan dibagi menjadi dua yaitu: pertama, administrasi dalam arti sempit adalah himpunan catatan-catatan pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk membiayai kegiatan suatu organisasi kerja dalam bentuk ketatausahaan atau pembukuan uang. Kedua, administrasi keuangan dalam arti luas adalah suatu kebijakan pengadaan dan penggunaan dana untuk melaksanakan kegiatan organisasi kerja dalam bentuk perencanaan, pengorganisasian, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Menurut Liang Gie, administrasi keuangan adalah proses pengurusan atau penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap kegiatan koperasi. Menurut Depdiknas (2007), pengelolaan keuangan adalah tindakan korporasi/administrasi keuangan yang terdiri dari dokumentasi, perencanaan, pelaksanaan, akuntabilitas, dan pelaporan. Akibatnya, manajemen keuangan sekolah dapat dilihat sebagai urutan operasi yang dirancang untuk mengatur keuangan sekolah, termasuk perencanaan, penggunaan, pengumpulan data, pelaporan, dan tanggung jawab atas penggunaan uang yang dimaksudkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan adalah suatu sistem organisasi keuangan untuk pelaksanaan anggaran.²

2. Pinsip-Prinsip Administrasi Keuangan

Administrasi keuangan merupakan kegiatan pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana secara sistematis untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

1. Prinsip Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan dalam pengelolaan keuangan sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui bagaimana dana diperoleh, digunakan, dan dilaporkan. Dengan transparansi, pengelolaan keuangan dapat diawasi oleh pihak terkait sehingga meminimalkan penyalahgunaan dana.

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun hukum. Setiap kegiatan keuangan harus memiliki bukti transaksi yang jelas serta laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang.³

3. Prinsip Efektivitas

Efektivitas berarti penggunaan dana harus mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dana yang dikelola harus digunakan untuk kegiatan yang benar-benar mendukung tercapainya tujuan organisasi atau lembaga.

4. Prinsip Efisiensi

² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Manajemen Keuangan Sekolah* (Jakarta: Depdiknas, 2007), hlm. 12.

³ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 47.

Efisiensi berarti penggunaan dana dilakukan secara hemat tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai. Pengeluaran keuangan harus dipertimbangkan secara matang agar tidak terjadi pemborosan.

5. Prinsip Ketertiban Administrasi

Setiap kegiatan keuangan harus dilakukan secara tertib sesuai prosedur yang berlaku, seperti pencatatan transaksi, penyimpanan bukti pembayaran, serta penyusunan laporan keuangan secara teratur.

6. Prinsip Kepatuhan terhadap Peraturan

Pengelolaan administrasi keuangan harus mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik aturan internal organisasi maupun peraturan pemerintah.

3. Fungsi Administrasi Keuangan

Administrasi keuangan dalam pendidikan memiliki peranan atau fungsi penting dalam menjamin kelancaran operasional lembaga pendidikan. Melalui pengelolaan keuangan yang baik, institusi pendidikan dapat merencanakan, mengorganisasikan, dan mengevaluasi penggunaan dana secara efisien dan efektif. Hal ini membantu sekolah dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, membayar honorarium guru dan tenaga kependidikan, serta mendukung kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, administrasi keuangan yang tertib akan berkontribusi pada peningkatan mutu

pendidikan secara menyeluruh. Selain itu, administrasi keuangan yang baik juga berfungsi sebagai alat kontrol dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.⁴ Setiap pengeluaran dan pemasukan tercatat dengan rapi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, yayasan, maupun masyarakat. Kejelasan dalam pengelolaan dana ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan serta mendorong partisipasi lebih besar dari stakeholder dalam mendukung program-program sekolah. Oleh karena itu, manfaat administrasi keuangan bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam pembangunan dunia pendidikan. (Siswadi & Rodiyah, 2022).

4. Sumber Dana Keuangan

Pasal 46 UU No.20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional: pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.⁵

1. Dana dari Pemerintah.

Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur Anggaran Rutin dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini lazim disebut dana rutin. Besarnya dana yang dialokasikan di dalam DIK biasanya ditentukan berdasarkan jumlah siswa kelas I, II dan III (tingkat SLA/SLP). Mata anggaran dan besarnya dana untuk masing-masing jenis pengeluaran sudah ditentukan Pemerintah di dalam DIK. Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana rutin (DIK) harus benar-benar sesuai dengan mata anggaran tersebut. Selain DIK, pemerintah sekarang juga memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana ini diberikan secara berkala yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah.

2. Dana dari Orang Tua Siswa.

Pendanaan dari masyarakat ini dikenal dengan istilah iuran Komite. Besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa ditentukan oleh rapat Komite sekolah. Pada umumnya dana Komite terdiri atas:

⁴ Siswadi dan Rodiyah, "Manajemen Administrasi Keuangan dalam Pengelolaan Sekolah," *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2022, hlm. 67.

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 46.

- a. Dana tetap bulan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh orang tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah
 - b. Dana insidental yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya satu kali selama tiga tahun menjadi siswa (pembayarannya dapat diangsur).
 - c. Dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa tertentu yang dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya secara sukarela tanpa suatu ikatan apapun.
 - d. Sumbangan dana dari orang tua siswa berasal dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang selanjutnya menjadi Dana Pembinaan Pendidikan (DPP) dan dari Sumbangan Organisasi Persatuan orang tua murid dan guru (POMG). Untuk sekolah negeri sumber dari orang tua siswa sudah banyak yang tidak digunakan lagi karena ada kebijakan sekolah gratis di tingkat pemerintah pusat dan daerah.
3. Dana dari Masyarakat

Dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Sumbangan sukarela yang diberikan tersebut merupakan wujud dari kepeduliannya karena merasa terpanggil untuk turut membantu kemajuan pendidikan. Dana ini ada yang diterima dari perorangan, dari suatu organisasi, dari yayasan ataupun dari badan usaha baik milik pemerintah maupun milik swasta. Salah satu bentuk sumbangan dari masyarakat seperti; wakaf, hibah, corporate social responsibility (CSR) bentuk pertanggung jawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitar.

Pemeriksaan mengatur kriterianya, bagaimana cara melakukannya, dan akan dilakukan oleh siapa. Kegiatan umpan balik merumuskan kesimpulan dan saran-saran untuk kesinambungan terselenggarakannya Manajemen Operasional Sekolah yang pada penyusunan rencana (planning) di dalam setiap penggunaan anggaran. Langkah pertama dalam penentuan rencana pengeluaran keuangan adalah menganalisa berbagai aspek yang berhubungan erat dengan pola perencanaan anggaran, yang didasarkan pertimbangan kondisi keuangan, line of business, keadaan para nasabah/konsumen, organisasi pengelola, dan skill para pejabat pengelola. Proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi:

1. Perencanaan anggaran
2. Strategi mencari sumber dana sekolah
3. Pengawasan dan evaluasi anggaran.
4. Pertanggungjawaban Pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah diatur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Ada beberapa hal yang berhubungan dengan penyusunan RAPBS, antara lain:
 1. Penerimaan
 2. Penggunaan
 3. Pertanggungjawaban

5. Proses Administrasi Keuangan.

Proses Administrasi Keuangan (Penyusunan RPS, RKAS, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban).

5.1. Penyusunan RPS

Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang amat penting, yang harus dimiliki sekolah untuk dijadikan sebagai panduan dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah, baik untuk jangka panjang (20 tahun), menengah (5 tahun) maupun pendek (satu tahun).

Atas dasar itu, Depdiknas telah menyiapkan sebuah panduan teknis bagi sekolah dalam penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah, yang disampaikan oleh Prof. Slamet PH. MA, MEd, MA, MLHR, Ph.D, yang mengupas tentang:

- 1). Pentingnya Rencana Pengembangan Sekolah (RPS).

RPS penting dimiliki untuk memberi arah dan bimbingan para pelaku sekolah dalam rangka menuju perubahan atau tujuan sekolah yang lebih baik (peningkatan, pengembangan) dengan resiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan.

2). Arti Perencanaan Sekolah/RPS.

Perencanaan sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan sekolah yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. RPS adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan/tujuan sekolah yang telah ditetapkan.

3). Tujuan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS).

RPS disusun dengan tujuan untuk: (1) menjamin agar perubahan/tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil; (2) mendukung koordinasi antar pelaku sekolah; (3) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antarsekolah dan dinas pendidikan kabupaten/kota, dan antarwaktu

4). Sistem Perencanaan Sekolah (RPS).

Sistem Perencanaan Sekolah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan sekolah untuk menghasilkan rencana-rencana sekolah (RPS) dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara sekolah dan masyarakat (diwakili oleh komite sekolah).

5). Tahap-tahap Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) mencakup:

- a. Melakukan analisis lingkungan strategis sekolah;
- b. Melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan sekolah saat ini (IPS);
- c. Memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang;
- d. Mencari kesenjangan antara butir 2 & 3;
- e. Menyusun rencana strategis;
- f. Menyusun rencana tahunan;
- g. Melaksanakan rencana tahunan; dan
- h. Memonitor dan mengevaluasi.

5.2. Penyusunan RKAS

Tujuan penyusunan RKAS

- 1) Memberikan arah yang jelas terhadap program sekolah
- 2) Merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah di masa yang akan datang
- 3) Menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pendanaan pada kegiatan-kegiatan sekolah.
- 4) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- 5) Mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dan hal dukungan dan pengawasan.
- 6) Mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat beserta hal dukungan financial.
- 7) Menjamin tercapainya penggunaan sumber dana secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan.

5.3. Pertanggung jawaban keuangan sekolah

Tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah, dan juga komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah (Rebore & Rebore dalam Narhizrah, 2013:185). Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua peserta didik dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dana. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan lainnya. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini penting, agar pemerintah atau

masyarakat pemberi dana tahu untuk apa saja uang yang telah diberikan ke sekolah dimanfaatkan, apakah kegiatan yang didukung oleh dana tersebut terlaksana atau terimplementasikan sebagaimana yang direncanakan, serta bagaimana hasil kegiatan yang didukung oleh dana tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan tugas utama sekolah, yaitu pembelajaran peserta didik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai administrasi keuangan, dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan merupakan suatu proses pengelolaan dana yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, pengawasan, serta pertanggungjawaban terhadap penggunaan keuangan dalam suatu organisasi atau lembaga, termasuk lembaga pendidikan. Pengelolaan keuangan yang baik sangat diperlukan agar seluruh sumber daya keuangan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Dalam praktiknya, administrasi keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, ketertiban administrasi, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang tertib, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana serta meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain itu, administrasi keuangan memiliki fungsi penting dalam mendukung kelancaran operasional organisasi, khususnya dalam perencanaan program, pengambilan keputusan, serta pengendalian kegiatan. Sumber dana dalam lembaga pendidikan dapat berasal dari pemerintah, orang tua peserta didik, maupun masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber dana tersebut harus dilakukan secara sistematis melalui proses perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan yang jelas.

Dengan demikian, administrasi keuangan tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pencatatan keuangan semata, tetapi juga sebagai sistem manajemen yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi. Melalui penerapan administrasi keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel, organisasi atau lembaga pendidikan dapat mencapai tujuan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fattah, N. (2012). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Siswadi, & Rodiyah. (2022). Manajemen Administrasi Keuangan dalam Pengelolaan Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 67.
- Ahmadi, A., & Supriyono. (2006). *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2007). *Manajemen Keuangan Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- ulyono. 2010. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nawawi, Hadari. 2012. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sagala, Syaiful. 2013. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.